



Pola Pikir Masyarakat dan Kinerja Kepala Desa: Mengapa Visi Hebat dalam Perencanaan Pembangunan Sering Kali Terhambat Oleh Kondisi Budaya Lokal

Alexander H. Badjuka¹, Edis Adelia Dunggio^{2*}, Yulita³, Ruaida Kadir⁴, Arit Pratama Putra Lihawa⁵

¹⁻⁵Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: abadjuka@ung.ac.id¹, dheladunggio@gmail.com², yulitaamruna@gmail.com³, ruaidakadir@gmail.com⁴, arit.Lihawa05@gmail.com⁵

*Penulis Korespondensi: dheladunggio@gmail.com

Abstract. *This study examines how community mindset and local cultural conditions influence the performance of village heads in implementing development planning in Libungo Village, Suwawa District, Bone Bolango Regency. The research applies a qualitative descriptive approach through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The main informants consisted of the village head, village officials, and members of the local community. The findings reveal that development implementation in Libungo Village remains constrained by both structural and cultural factors. Damaged roads, disconnected bridges caused by floods, and limited public participation indicate that development has not yet achieved optimal results. The village head emphasized that low human resource capacity and a dependency mentality among residents are major obstacles in realizing development programs. Many residents prefer to maintain their status as social assistance recipients rather than actively participate in empowerment programs and village development initiatives. This condition is reinforced by local cultural patterns such as passive attitudes, patron-client relations, and resistance to change. The study concludes that the success of village development is not solely determined by the competence and vision of the village head, but also by the readiness of community mindset and local culture to support social transformation. Therefore, participatory approaches, community empowerment, and long-term mindset transformation are necessary to strengthen sustainable village development.*

Keywords: *Community Mindset; Dependency Mentality; Local Culture; Village Development; Village Head Performance.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji bagaimana pola pikir masyarakat dan kondisi budaya lokal memengaruhi kinerja kepala desa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Libungo masih menghadapi hambatan struktural dan budaya. Infrastruktur desa seperti jalan yang rusak, jembatan yang terputus akibat banjir, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi indikator bahwa pembangunan belum berjalan optimal. Kepala Desa Libungo menegaskan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia dan mentalitas ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah menjadi hambatan utama dalam merealisasikan program pembangunan. Sebagian masyarakat lebih memilih mempertahankan status sebagai penerima bantuan sosial dibanding terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa. Kondisi ini diperkuat oleh budaya lokal berupa sikap pasif, hubungan patron-klien, dan resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kompetensi dan visi kepala desa, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan pola pikir masyarakat dan budaya lokal dalam mendukung transformasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan pola pikir secara berkelanjutan untuk memperkuat pembangunan desa.

Kata Kunci: Budaya Lokal; Kinerja Kepala Desa; Mentalitas Ketergantungan; Pembangunan Desa; Pola Pikir Masyarakat.

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam agenda pembangunan nasional Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan berdasarkan kebutuhan

masyarakat lokal. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek utama yang memiliki kewenangan untuk mengatur sumber daya, menyusun program pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

Di banyak wilayah, pembangunan desa masih menghadapi kesenjangan antara perencanaan dan hasil nyata di lapangan. Kondisi ini dapat dilihat dari masih ditemukannya infrastruktur yang rusak, lemahnya keterlibatan warga, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya desa. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan masih menjadi tantangan utama di banyak desa di Indonesia (Dulkiah et al., 2023).

Desa Libungo menjadi contoh yang menarik untuk dikaji karena pembangunan di wilayah ini belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Kondisi jalan yang rusak, jembatan yang terputus, dan rendahnya keterlibatan masyarakat menunjukkan bahwa persoalan pembangunan tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan pola pikir warga dan hubungan mereka dengan pemerintah desa. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan desa harus dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

Dalam konteks tersebut, peran kepala desa menjadi sangat penting karena kepala desa tidak hanya bertugas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan penggerak partisipasi masyarakat. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa yang terbuka, komunikatif, dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial budaya masyarakat dapat mendorong keterlibatan warga secara lebih aktif (Balya et al., 2025).

Namun demikian, kepemimpinan yang baik tetap dapat terhambat jika masyarakat masih memiliki pola pikir ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Dalam banyak kasus, budaya pasif dan orientasi pada bantuan jangka pendek membuat masyarakat kurang terdorong untuk berinisiatif dalam pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pikir masyarakat menuju kemandirian dan tanggung jawab kolektif (Mulki & Istiqomah, 2024). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana pola pikir masyarakat berpengaruh terhadap kinerja kepala desa dalam pembangunan Desa Libungo. Kajian ini juga diperlukan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara budaya lokal, partisipasi masyarakat, dan implementasi kebijakan pembangunan di tingkat desa (Anggara & Pribadi, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Pola pikir masyarakat dalam pembangunan desa Merujuk pada cara warga memaknai perubahan, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam proses pembangunan. Dalam banyak penelitian, keberhasilan pembangunan tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah desa, tetapi juga oleh kesiapan mental masyarakat untuk ikut terlibat aktif. Ketika masyarakat memiliki pola pikir yang terbuka terhadap perubahan, proses pembangunan cenderung lebih partisipatif dan berkelanjutan (Studies et al., 2024).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam pembangunan desa karena menentukan sejauh mana warga serta tidak mencakup wawasan, tenaga, dan pengawasan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi dalam musyawarah desa masih sering berada pada tingkat informasi atau konsultasi, belum sampai pada keterlibatan yang benar-benar menentukan keputusan. Hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat sering bersifat terbatas dan belum sepenuhnya substantif (Fahik et al., 2024).

Dalam teori partisipasi, keterlibatan warga bukan hanya dilihat dari kehadiran fisik dalam rapat, tetapi juga dari kemampuan mereka mempengaruhi kebijakan pembangunan. Studi partisipasi masyarakat di desa menunjukkan bahwa pendidikan, kesadaran, dan akses informasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap aktif atau pasifnya warga dalam pembangunan. Jika warga tidak memiliki akses pengetahuan yang memadai, partisipasi cenderung berjalan lambat (Dulkiah et al., 2023).

Kinerja kepala desa dapat dipahami sebagai kemampuan pemimpin desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan melancarkan pembangunan secara efektif. Sejumlah penelitian membuktikan bahwa kepemimpinan kepala desa memiliki hubungan positif dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kepala desa yang komunikatif, persuasif, dan mampu membaca kebutuhan sosial biasanya lebih berhasil membangun kepercayaan warga dibandingkan pemimpin yang hanya fokus pada administrasi (Balya et al., 2025).

Selain faktor kepemimpinan, implementasi kebijakan publik di desa juga sangat bergantung pada kesesuaian antara program pemerintah dan kondisi sosial masyarakat. Kebijakan yang baik pada dasarnya harus mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan, bukan hanya tertulis dalam dokumen perencanaan. Dalam konteks desa, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kebijakan komunikasi, ketersediaan sumber daya, dan respon masyarakat terhadap program yang dijalankan (Hakim & Hanif, 2025).

Penelitian tentang pembangunan desa juga menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang lebih efektif dibandingkan sekadar penyaluran bantuan. Pemberdayaan mendorong warga untuk mengembangkan kemampuan, memanfaatkan potensi lokal, dan membangun kemandirian ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, kebijakan desa yang hanya menekankan bantuan tanpa proses pemberdayaan berisiko melahirkan ketergantungan baru (Dushkova & Ivlieva, 2024).

Budaya lokal memiliki posisi penting dalam menjelaskan dinamika pembangunan desa. Di satu sisi, nilai gotong royong dan solidaritas dapat menjadi modal sosial yang mendukung keberhasilan program pembangunan. Namun di sisi lain, budaya patronase, sikap pasif, dan ketergantungan pada bantuan dapat menjadi penghambat jika tidak dikelola dengan baik. Dalam banyak kasus, hambatan budaya membuat masyarakat lebih nyaman menjadi penerima program dibandingkan menjadi penggerak pembangunan .

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, kajian pustaka ini menyatakan bahwa pembangunan Desa Libungo perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara pola pikir masyarakat, kepemimpinan kepala desa, dan efektivitas implementasi kebijakan publik. Keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai hanya dengan memperkuat sisi birokrasi, tetapi juga harus dibarengi dengan perubahan kesadaran menuju partisipasi masyarakat dan kemandirian.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif karena tujuan utamanya adalah memahami secara mendalam hubungan antara pola pikir masyarakat, budaya lokal, dan kinerja kepala desa dalam pembangunan Desa Libungo. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat sosial, dinamis, dan sangat dipengaruhi oleh konteks kehidupan masyarakat setempat, sehingga tidak cukup dijelaskan hanya dengan data statistik. Dalam penelitian pembangunan desa, pendekatan kualitatif sering digunakan untuk menangkap pengalaman, pandangan, dan makna yang muncul dari interaksi sosial di lapangan (Rosadi, 2024).

Lokasi penelitian berada di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena desa ini menunjukkan kondisi pembangunan yang belum optimal, terutama pada aspek infrastruktur dasar dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana masyarakat memandang pembangunan desa, bagaimana pola pikir mereka

mempengaruhi keterlibatan dalam program pembangunan, serta bagaimana kepala desa berupaya dalam menghadapi kondisi sosial tersebut .

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat setempat untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pengalaman mereka terhadap pembangunan desa. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi fisik desa, aktivitas masyarakat, dan bentuk partisipasi yang muncul di lapangan, sedangkan dokumentasi dimanfaatkan untuk menelaah dokumen seperti RPJMDes, APBDes, dan laporan pembangunan desa sebagai bahan pendukung analisis (Jatmikowati, 2024).

Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini memungkinkan peneliti menyeleksi informasi yang paling relevan, menyusun temuan secara sistematis, dan menghubungkan data empiris dengan kerangka teori yang digunakan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik agar hasil penelitian lebih kuat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Libungo belum berjalan secara optimal. Kondisi ini terlihat dari masih rusaknya sejumlah ruas jalan desa dan terputusnya jembatan penghubung akibat banjir, yang menghambat mobilitas warga serta akses menuju layanan publik. Temuan ini menegaskan bahwa permasalahan pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek infrastruktur teknis, tetapi juga dengan dukungan sosial terhadap agenda pembangunan masyarakat.

Dalam proses pengumpulan data, terungkap bahwa masyarakat belum sepenuhnya menempatkan pembangunan desa sebagai tanggung jawab bersama. Sebagian masyarakat masih memandang pembangunan sebagai urusan pemerintah desa semata, sehingga keterlibatan mereka dalam musyawarah maupun pelaksanaan kegiatan masih rendah. Pola seperti ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sering kali baru muncul ketika program dianggap menguntungkan secara langsung (Dulkiah et al., 2023).

Kepala Desa Libungo dalam wawancara menegaskan bahwa salah satu hambatan terbesar pembangunan bukan semata-mata ketersediaan program, melainkan rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat. Ia menilai sebagian warga masih memiliki

kecenderungan untuk bergantung pada bantuan dan kurang terdorong untuk membangun kemandirian. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja kepala desa perlu dibaca tidak hanya dari kemampuan administratifnya, tetapi juga dari kemampuannya mengelola mentalitas sosial warga (Balya et al., 2025).

Secara teoritis, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi yang efektif mencakup keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Jika masyarakat hanya hadir secara formal tanpa kontribusi gagasan dan tenaga, maka partisipasi tersebut belum menghasilkan perubahan yang bermakna (Hardiyanto & Mustofa, 2025).

Di sisi lain, kinerja kepala desa di Desa Libungo menampilkan adanya upaya adaptif untuk merespons kondisi tersebut. Kepala desa berusaha membangun komunikasi melalui forum informal, menggerakkan masyarakat, dan memprioritaskan program yang hasilnya dapat langsung dirasakan warga. Strategi seperti ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan partisipatif lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan warga desa (February et al., 2025).

Namun, strategi tersebut belum menghasilkan perubahan yang signifikan karena pola pikir masyarakat tidak berubah dalam waktu singkat. Banyak warga yang masih menilai bantuan pemerintah sebagai tujuan utama dibandingkan peluang untuk mandiri melalui program pemberdayaan. Dalam beberapa penelitian, kecenderungan seperti ini sering dianggap sebagai bentuk kemandirian sosial yang muncul ketika bantuan lebih dominan daripada proses pembelajaran dan penguatan kapasitas.

Dari sudut pandang implementasi kebijakan publik, masalah yang muncul di Desa Libungo menunjukkan adanya jarak antara tujuan kebijakan dan kondisi lapangan. Kebijakan pembangunan desa pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian, namun dalam praktiknya masih terkendala oleh minimnya pemahaman, rendahnya dukungan sosial, dan terbatasnya kemampuan aparatur maupun masyarakat. Penelitian lain menegaskan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kebijakan komunikasi, sumber daya, dan respons aktor lokal (Geohansa et al., 2025).

Bila dilihat dari partisipasi warga, penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat lebih banyak berada pada tahap kehadiran, bukan pengambilan keputusan. Warga hadir pada saat ada kegiatan tertentu, namun belum sepenuhnya aktif menyampaikan gagasan, mengawasi pelaksanaan, atau ikut bertanggung jawab atas hasil pembangunan. Fenomena ini

menunjukkan bahwa partisipasi di Desa Libungo masih bersifat terbatas dan perlu ditingkatkan menjadi partisipasi yang lebih substantif (Anggara & Pribadi, 2024).

Budaya lokal juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pola hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa. Sistem kekerabatan yang kuat sebenarnya dapat menjadi modal sosial, namun dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi budaya menunggu, pasif, dan terlalu bergantung pada figur pemimpin. Ketika kepala desa diposisikan sebagai penolong utama, maka tanggung jawab kolektif untuk membangun desa menjadi melemah (Kurniawan et al., 2021).

Dalam konteks ini, pembangunan desa seharusnya tidak hanya diukur dari keberhasilan fisik seperti jalan atau jembatan, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam menanggapi program pemerintah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas warga melalui pemberdayaan lebih efektif dibandingkan sekadar pendistribusian bantuan. Oleh karena itu, pembangunan yang berkelanjutan harus disertai dengan upaya membentuk kesadaran, keterampilan, dan rasa memiliki terhadap program desa .

Sebagai tanggapan dan saran, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya kebijakan publik yang lebih kontekstual di tingkat desa. Pemerintah desa perlu memperkuat edukasi masyarakat, melibatkan kelompok rentan, dan menciptakan ruang partisipasi yang benar-benar terbuka. Selain itu, kepala desa perlu didukung oleh sistem komunikasi publik yang transparan agar masyarakat memahami tujuan program dan tidak melihat pembangunan hanya sebagai distribusi bantuan (February et al., 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Desa Libungo sangat ditentukan oleh sinergi antara kinerja kepala desa, efektivitas kebijakan, dan perubahan pola pikir masyarakat. Jika ketiga unsur ini berjalan bersama, maka pembangunan desa tidak hanya menghasilkan perbaikan fisik, tetapi juga membangun kemandirian sosial yang lebih kuat (Nasution et al., 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan Desa Libungo menunjukkan bahwa keberhasilan program desa tidak dapat diukur hanya dari tersedianya anggaran dan rencana kerja, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memahami dan mendukung arah pembangunan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perubahan sosial di tingkat desa memerlukan partisipasi aktif warga, karena pembangunan yang berkelanjutan lebih mudah tercapai ketika masyarakat dilibatkan sejak perencanaan hingga evaluasi. Temuan ini sejalan dengan kajian terbaru yang menempatkan

partisipasi masyarakat sebagai faktor penentu dalam pembangunan pedesaan (Андерсон, 2023).

Selain itu, pola pikir masyarakat yang masih cenderung bergantung pada bantuan pemerintah menjadi penghambat utama dalam mendorong kemandirian desa. Selama masyarakat belum sepenuhnya melihat pembangunan sebagai tanggung jawab bersama, maka program desa akan tetap bertumpu pada logika penerimaan bantuan, bukan penguatan kapasitas lokal. Karena itu, pembangunan desa perlu diarahkan pada pemberdayaan yang menumbuhkan inisiatif, tanggung jawab, dan kemampuan warga untuk mengelola potensi mereka sendiri (Hidayat & Maza, 2024).

Kinerja kepala desa dalam kasus Desa Libungo telah menunjukkan adanya upaya untuk menggerakkan masyarakat melalui pendekatan komunikasi, keteladanan, dan prioritas program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Namun, efektivitas upaya tersebut masih bergantung pada kemampuan kepala desa membangun kepercayaan publik dan mereduksi budaya pasif yang berkembang di masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa yang transformasional, partisipatif, dan komunikatif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya (Influence et al., 2022).

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi pembangunan desa harus disertai paradigma baru yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pemberdayaan. Kebijakan yang hanya menekankan output fisik tanpa membangun basis sosial dan kapasitas warga berpotensi menghasilkan pembangunan yang tidak bertahan lama. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan desa sering terhambat oleh keterbatasan fleksibilitas isi kebijakan, kendala sumber daya, dan komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat desa (Pravita et al., 2022).

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan Desa Libungo sangat ditentukan oleh sinergi antara kepemimpinan kepala desa, perubahan pola pikir masyarakat, dan orientasi kebijakan yang mendukung kemandirian. Jika ketiganya berjalan seimbang, maka pembangunan tidak hanya menghasilkan perbaikan infrastruktur, tetapi juga memperkuat modal sosial dan kualitas kehidupan warga desa dalam jangka panjang. Kajian tentang smart village dan inovasi layanan publik menunjukkan bahwa keberhasilan desa di masa depan sangat bergantung pada kepemimpinan yang adaptif, kapasitas aparatur, dan literasi masyarakat dalam menerima perubahan (Mojowarno, 2024).

DAFTAR REFERENSI

- Anggara, R., & Pribadi, U. (2024). *Community participation in village deliberations: Examining the dynamics of influencing factors*, 8(1), 85–95.
- Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Balya, M., Putra, R. M., & Purnomohadi, R. (2025). *Transformative leadership of village heads in enhancing public participation (A case research in Paloh Gadeng Village, North Aceh)*, 5(01).
- Dulkiah, M., Simon, C., & Widoyo, H. (2023). *Community participation forms in Indonesian villages to*, 1–24.
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). *Empowering communities to act for a change: A review of the community empowerment programs towards sustainability and resilience*.
- Fahik, Y., Laniria, A., Barros, C., & Seran, R. (2024). *The description of community participation in development*, 12(1), 65–72.
- February, M., Pratama, A., & Wahyudi, R. (2025). *The influence of village head leadership on community participation in development in Bagan Cempedak Village, Rantau Kopar District, Rokan Hilir Regency*, 3(1), 60–66.
- Geohansa, A., Sumarna, E., & Kania, I. (2025). *Digitization of village government as a sustainable development strategy towards the realization of smart villages*, 2(4), 254–267. <https://doi.org/10.62885/polisci.v2i4.742>
- Hakim, M. L., & Hanif, N. A. (2025). *Tinjauan satu dekade kebijakan nasional pembangunan desa berkelanjutan di Indonesia*, 30–38.
- Hardiyanto, W., & Mustofa, A. (2025). *Community participation in the implementation of village development deliberations in Ujung Kota Village Surabaya*, 5(3), 208–224.
- Hidayat, R., & Maza, R. El. (2024). *Encouraging community empowerment and local economic independence in villages through sustainable economic development techniques*, 3(02), 239–245. <https://doi.org/10.58812/esee.v3i02>
- Influence, T. H. E., The, O. F., Style, L., The, O. F., Headman, V., Apparatus, T. H. E. V., On, C., Success, T. H. E., Development, O. F., & Sriamur, I. N. (2022). *Village headman and the village apparatus competence on the success of development in Sriamur*, 183–203.
- Jatmikowati, S. H. (2024). *Community participation in village development*, 5(6), 124–145. <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2024.6.10>
- Kurniawan, W., Purba, K., & Fithriyyah, M. U. (2021). *The relationship of village head leadership and citizens' participation in development in transmigrant villages*, 7–20.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?* World Bank.
- Mojowarno, D. (2024). *Desa cerdas dan inovasi pelayanan publik di masa endemi: Smart village and public service innovation in endemic times*, 75–88.
- Mulki, Y. A., & Istiqomah, N. (2024). *The impact of typology capital on community empowerment programs: Evidence from rural development in Indonesia*, 25(April). <https://doi.org/10.18196/jesp.v25i1.20083>

- Nasution, S. H., Siti, N., Siregar, S., Jamaludin, Y., & Medan, U. (2025). *Journal la sociale*, 6(2), 490–497. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v6i2.1928>
- Pravita, V. D., Handoko, R., Universitas, E. I., & Email, I. (2022). *The implementation of Law Number 6/2014 on villages in the village government in Sleman Regency. Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, (6), 1529–1535.
- Pretty, J. N. (1995). *Participatory learning for sustainable agriculture. World Development*, 23(8), 1247–1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Rosadi, B. (2024). *Community participation in the development planning process of the village area*, 3(2), 144–153.
- Studies, S., Rasda, M., Hasan, K., Muhammad, M., & Makassar, U. N. (2024). *Village government strategies to enhance community participation in development: A case study in Garessi Village, Tanete Rilau District, Barru Regency*, 4(1), 188–202.
- United Nations Development Programme. (2022). *Human development report 2021/2022: Uncertain times, unsettled lives: Shaping our future in a transforming world*. United Nations Development Programme.
- Андерсон, И. (2023). *Структурная модель участия сообщества в развитии сельских районов в провинции Джамби, Индонезия*, 7, 115–141. <https://doi.org/10.3897/popecon.7.e97189>